

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2023
Waktu : 14.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 33 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
3. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan);
4. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
5. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
6. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);

7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
8. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dibuka pukul 14.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7.648.615.254.000,00 (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp449.809.277.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp73.672.711.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp300.881.069.000,00 (tiga ratus miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.357.357.741.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.748.497.174.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan**, sebesar Rp716.010.354.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - g. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp273.769.882.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp373.822.575.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp311.465.933.000,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp498.814.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp353.834.443.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp274.400.985.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp595.299.740.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp320.979.220.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Rancangan Tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan program dan menu usulan baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan seluruh tambahan pagu anggaran tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas, untuk program berbasis masyarakat.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi pada ekosistem mangrove kritis di seluruh Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151